
**IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN PADA UMKM KRUPUK DI KOTA MATARAM**

Endang Kartini,¹⁾ Lalu Mimbar,²⁾ Izrawati,³⁾

¹⁾²⁾ STIE AMM Mataram, ³⁾ MTs.Negeri 1 Lombok Barat
endangkartini979@gmail.com¹
mamimimbar@gmail.com²
zrawati12@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) Mengetahui bentuk implementasi akuntansi berdasarkan SAK EMKM pada UMKM Krupuk di Kota Mataram, 2) Implementasi akuntansi pada UMKM Krupuk di Kota Mataram telah sesuai dengan SAK EMKM. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif, berupa daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada pengusaha UMKM kerupuk sehubungan dengan implementasi akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Analisa data dengan menggunakan metode deskriptif, Hasil penelitian menunjukkan bentuk implementasi akuntansi pada UMKM kerupuk di Kota Mataram masih sangat sederhana dan rata-rata belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, karena banyak yang belum memenuhi tahapan-tahapan siklus akuntansi. Kendala-kendala yang dihadapi untuk menyusun laporan keuangan yaitu masih kurangnya pengetahuan secara teknis dalam menyusun laporan tersebut, khususnya berbasis SAK, serta kurangnya kesadaran dan disiplin dari pihak UMKM akan pentingnya laporan keuangan yang lengkap dan sesuai standar UMKM, pentingnya laporan keuangan sebagai bahan atau alat untuk mengevaluasi hasil operasional masing-masing usaha mereka. Pemahaman para pengusaha UMKM Kerupuk mengenai Standar Akuntansi Keuangan ternyata masih kurang. Penyajian laporan keuangan secara keseluruhan bagi para pengusaha UMKM rata-rata sebesar 50.72% yang memenuhi kesesuaian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Kata Kunci: Implementasi_Akuntansi, Berdasarkan_SAK_UMKM

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan aktifitasnya, badan usaha memiliki tujuan yaitu dalam rangka memperoleh laba. Terlebih lagi bagi sector swasta yang dalam orientasinya adalah profit. Seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun badan usaha ini berbentuk usaha perorangan, namun tujuan awal dari dikembangkannya usaha adalah untuk

memperoleh laba. Untuk dapat berkembang dalam persaingan pasar, tentunya UMKM akan memperhitungkan laba dalam setiap kegiatannya. Laba usaha mencerminkan bagaimana kemampuan pelaku usaha dalam mengelola usahanya. Karena laba merupakan cerminan dari kinerja perusahaan, hal itu akan dapat meningkatkan kepercayaan pihak lain seperti investor, kreditur, dan lembaga pemerintah.

Beberapa kasus UMKM yang ada di Lombok Barat seperti di Seganteng, masih memiliki kendala dalam pengelolaan keuangannya. Hal inilah yang menyebabkan usaha kecil masih belum memiliki laporan keuangan yang baik (Marsiwi, dkk, 2020). Beberapa UMKM berpandangan bahwa laporan keuangan adalah laporan tentang jumlah uang saja. Pelaku usaha seperti UMKM hanya menfokuskan diri pada bagaimana usaha dapat bertahan di tengah derasnya persaingan bisnis yang semakin ketat. Sebagai usaha yang masih kecil, tidak jarang seluruh aktivitas dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Hal ini menyebabkan pelaku usaha tidak dapat menyisihkan waktu untuk mencatat dan mengelola keuangan dengan baik. Pelaku UMKM merasa tidak memiliki cukup modal untuk dapat membayar tenaga di bidang keuangan. Pelaku UMKM masih mencampur-adukkan harta pribadi pemilik dengan harta milik usaha.

Berbagai masalah pada UMKM untuk mengelola keuangan, dampak yang muncul adalah UMKM sulit untuk mengembangkan usahanya dengan baik karena konsep entitas bisnis yang memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan usaha tidak jelas. Pelaku usaha juga tidak dapat menyusun rencana dengan lebih tepat. Lebih lanjut pelaku usaha tidak dapat menentukan laba setiap periode dengan baik. Akibatnya jika menginginkan tambahan modal, pelaku UMKM mendapatkan kesulitan memperoleh pinjaman dana atau bantuan dana, karena tidak memiliki laporan keuangan.

Menurut Martini (2015) akuntansi tidak hanya diperuntukkan bagi entitas bisnis semata. Dalam perkembangannya, akuntansi juga dibutuhkan pada entitas lain, seperti entitas- pemerintah,- yayasan,- LSM, dan sebagainya. Akuntansi dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, yaitu sebagai proses, sistem informasi, dan seperangkat pengetahuan (Suwarjono, 2001). Kelurahan Seganteng Kota Mataram dikenal sebagai pusat usaha kerupuk kulit tradisional kulit sapi dan kerbau. Ada 25 UMKM kerupuk kulit tradisional di 6 desa. Sampai saat ini Pelaku UMKM masih kurang menyadari pentingnya penggunaan akuntansi dan manajemen untuk usahanya, bahkan ada juga yang sama sekali tidak menerapkan pencatatan akuntansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu data yang tidak dapat dinyatakan dengan satuan angka. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data kualitatif berupa daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada pengusaha UMKM kerupuk di Seganteng Kota Mataram sehubungan dengan implementasi akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Analisa data yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu terlebih dahulu mengumpulkan data kemudian diklarifikasi, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data selama proses penelitian, maka didapat hasil bahwa sebagian besar responden merupakan UMKM yang berada dibawah binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Mataram yaitu sebesar 76% dari total responden seluruhnya atau sebanyak 19 UMKM. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah

Daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian 9 unit usaha atau sebesar 36% merupakan unit usaha yang bersifat independen yang hampir seluruh hal mengenai usahanya mulai dari pengaturan manajemen keuangan, produksi maupun pemasaran dilakukan secara pribadi dan hanya 3 dari 25 responden yang merupakan unit usaha dibawah binaan swasta yang juga bertujuan membantu meningkatkan kualitas pengusaha UMKM Kerupuk di Seganteng Kota Mataram.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 16% UMKM yang memahami SAK 84% tidak memahami tentang SAK. Pencatatan keuangan yang disajikan selama ini hanya pemasukan dan pengeluaran. Namun apabila dilihat pencatatan keuangan atau pembukuan yang dihasilkan, 80% unit usaha UMKM telah melakukan pembukuan yang sebagian besar dilakukan secara manual, sedangkan informasi akuntansi harus dihasilkan tepat waktu agar informasi tersebut relevan sebagaimana yang diisyaratkan oleh SAK.

Dalam menghasilkan informasi tepat waktu, sudah seharusnya implementasi akuntansi tersebut dilakukan secara komputerisasi atau dibantu dengan software akuntansi. Beberapa UMKM hanya menggunakan perangkat lunak Microsoft excel untuk melakukan pencatatan transaksinya itupun yang dianggap mampu dan memahami tentang penggunaan software tersebut. Seluruh pemilik UMKM kerupuk beranggapan bahwa membeli software akuntansi masih dirasa sangat memberatkan dan tidak sesuai dengan manfaat langsung yang akan diperoleh sehingga pencatatan manual yang dilakukan dirasa sudah memenuhi tujuan laporan keuangan yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM tersebut dalam menerapkan akuntansi guna menghasilkan informasi keuangan belum memenuhi karakteristik mutu informasi yaitu relevan dan tepat waktu sebagaimana yang diisyaratkan dalam SAK.

Penggunaan software akuntansi hanyalah salah satu cara untuk menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu sehingga relevan informasinya. Pencatatan dengan menggunakan perangkat lunak microsoft excel sebenarnya masih dapat menghasilkan laporan keuangan tetapi untuk skala yang agak besar mempunyai kelemahan dalam penyimpanan data transaksi yang sangat banyak, sehingga tidak menjamin keamanan data. Serta kecepatan dalam menghasilkan informasi penggunaan software akuntansi akan sangat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat dan relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 76% UMKM telah melakukan pembukuan secara rutin setiap periodenya dan 24% unit usaha hanya melakukan pembukuan ketika dibutuhkan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak valid yang mengakibatkan banyak informasi yang diungkapkan secara tidak wajar.

Pada tabel tersebut di atas juga dapat dilihat bahwa hanya 76% UMKM yang memberikan informasi tentang dasar-dasar atau aturan dalam penyusunan laporan keuangan pada unit usaha tersebut, dan 24% para pelaku usaha juga tidak memberikan informasi atau akun-akun tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa masih lebih dari 76% UMKM tersebut yang tidak menyajikan laporan keuangannya secara lengkap atau memenuhi seluruh karakteristik mutu informasi akuntansi sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam SAK.

Dari hasil wawancara dengan para pengusaha UMKM 64% menyajikan laporan perubahan posisi keuangan atau neraca sederhana yang hanya mencakup kas, persediaan bahan baku pembuatan krupuk, dan aset tetap dan 36% tidak menyajikannya. Laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan belum sepenuhnya sesuai dengan neraca

minimal dalam SAK yang mencakup pos-pos tersebut. SAK juga mengatur penjelasan mengenai laporan laba/rugi, dimana para pengusaha UMKM kerupuk menyajikan laporan laba/rugi sebesar 84% atau sebanyak 21 pengusaha, sedangkan yang tidak menyajikan laporan laba/rugi sebanyak 4 pengusaha (16%). Apabila dilihat dari penyajian laporan arus kas, hanya 24% yang menyajikan laporan tersebut selebihnya tidak menyajikan laporan arus kas, ini disebabkan karena ketidakpahaman terhadap penyusunan laporan arus kas. Dalam ketentuan SAK yang mengatur dan menjelaskan tentang laporan asset lancar dan asset tidak lancar, pengusaha UMKM menyajikan sebagian kecil dari sejumlah pengusaha yang membuat asset lancar dan tidak lancar sebanyak 9 pengusaha atau 36%, dan 64% lainnya tidak menyajikan laporan tersebut.

Laporan laba-rugi di atas sama pentingnya dengan Laporan arus kas, namun pada Tabel di atas dapat dilihat hanya 24% UMKM yang menyajikan laporan arus kas, yang berarti 76% pengusaha UMKM belum memenuhi kelengkapan dalam pelaporan keuangan sesuai SAK. Arus kas akan memberikan informasi perubahan secara historis atas kas dan setara kas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasional dan pendanaan yang terjadi pada suatu unit usaha. Penyajian Klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode juga harus konsisten, kecuali jika ada perubahan yang cukup signifikan atas operasional para pelaku usaha atau perubahan penyajian pengklasifikasian laporan keuangan menjadi lebih baik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh SAK dan hanya 28% dari keseluruhan pengusaha yang menyajikan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan, yang berarti masih banyak para pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban dalam penyajian laporan keuangan berbasis SAK.

Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan, dari hasil wawancara peneliti dengan pemilik unit usaha kerupuk, hanya 24% unit usaha yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap yaitu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan hanya sesekali ketika dibutuhkan. Padahal setiap keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi keuangan yang dilaporkan secara lengkap, bukan hanya didasarkan pada laba semata. Namun 76% pengusaha UMKM tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap minimal satu kali dalam satu periode akuntansi. Artinya masih banyak pengusaha yang belum memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu kelengkapan sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Dalam menyajikan informasi komparatif (perbandingan) 68% pengusaha UMKM yang menyajikan, yang berarti sudah lebih dari setengah total pengusaha yang memenuhi penyajian wajar dari laporan keuangan sesuai SAK bahwa informasi yang diungkapkan secara komparatif atau dibandingkan laporan keuangan periode sekarang dengan sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh SAK (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan).

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa yang telah menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam penyusunan yang sesuai dengan siklus akuntansi serta sesuai dengan SAK rata-rata sebesar 50.72% UMKM. Hasil wawancara bersama para pengusaha, didapat beberapa UMKM yang berada dibawah binaan lembaga tertentu terutama pemerintah Kota Mataram pernah mendapat pelatihan terkait SAK. Namun menurut mereka pelatihan yang diberikan adalah pelatihan dasar melakukan pembukuan akuntansi seperti bagaimana mengarsip bukti-bukti transaksi serta teknik dasar pencatatan keuangan seperti proses dalam siklus akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan dan hanya bersifat seperti seminar sehari sehingga hanya memberikan teori semata tidak ada aspek prakteknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan permasalahan, hasil dan pembahasan yang tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa; bentuk implementasi akuntansi pada UMKM kerupuk di Seganteng Kota Mataram masih sangat sederhana dan rata-rata belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, karena banyak UMKM yang belum sepenuhnya memenuhi tahapan-tahapan siklus akuntansi. Kendala-kendala yang dihadapi pengusaha UMKM untuk menyusun laporan keuangan yaitu karena kurangnya pengetahuan secara teknis dalam menyusun laporan tersebut, khususnya berbasis SAK, serta kurangnya kesadaran dan disiplin dari pihak UMKM akan pentingnya laporan keuangan yang lengkap dan sesuai standar UMKM, pentingnya laporan keuangan sebagai bahan atau alat untuk mengevaluasi hasil operasional masing-masing usaha mereka.

Pemahaman para pengusaha UMKM Kerupuk di Kota Mataram mengenai Standar Akuntansi Keuangan ternyata masih kurang. Hal ini disebabkan karena para pengusaha UMKM merasa kurang mendapat sosialisasi oleh dinas setempat terkait menyajikan laporan keuangan untuk mengimplementasikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Penyajian laporan keuangan secara keseluruhan bagi para pengusaha UMKM rata-rata sebesar 50.72% yang memenuhi kesesuaian berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Selanjutnya harapan para pengusaha untuk bisa lebih memahami dalam penyusunan laporan keuangan dapat di tindak lanjuti pelatihan atau pengusaha berharap agar pihak terkait dapat menindaklanjuti pelatihan tersebut dan diadakan pemantauan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreani, Juli, Majalah Akuntan Indonesia, Edisi Pebruari – Maret 2016.
- Bragg, Steven M dan Burton, E James. Accounting and Finance for Your Small Business; Second Edition.
- Herwiyanti, E dkk (2017); Akuntansi UMKM, ISBN : 978-602-74341-4-1 Penerbit : SARASWATI NITISARA
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. Exposure Draft Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan No.8: Pencabutan Keuangan) Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Akuntansi Perkoperasian.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM). <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/emkm>, diakses 1 Maret 2023.
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 27 Akuntansi Koperasi. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kieso, Donald, F, Jeery J Weygandt and Terry D Warfield, 2010, Intermediate Accounting, Edisi 1 Vol. 1, John Willey and Sons.
- Marsiwi, Dwiati, Asis, dan Purwanto, 2020, Characteristics and Problematics of SMEs in Ponorogo, Jurnal Ekulibrium, Vol. 15 No. 1, Maret, [http:// journal.umpo.ac.id/index.php/ ekuilibrium/index](http://journal.umpo.ac.id/index.php/ekuilibrium/index).

- Martini, Dwi, Sylvia, dkk, 2016, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara RI Tahun 1992, No. 116. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pinnarwan Dj.dkk; 2021, Standar Akuntansi Keuangan (SAK); Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)
- Suwarjono, 2001, Akuntansi Pengantar 1, BPFE Yogyakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah, Salemba Empat Jakarta.
- Suwardjono. 2013. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. BPFE: Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
- Warsono, et al. 2009. Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan 116Dipraktikkan. Asgard Chapter, Yogyakarta